

**SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DALAM
MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT PADA DINAS
PERSANDIAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
MANOKWARI**

Yosua Wamafma
NPP 29.1925

*Asdaf Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat
Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan*

Email : yosuawamafma0129@gmail.com

ABSTRACT

Problem statement/background: Manokwari Regency in implementing the Electronic-Based Government System there are still several problems that hinder the implementation of the Electronic-Based Government System. The evaluation index for the Electronic-Based Government System in Manokwari Regency is still lacking in the 2021 assessment, which is still at 1.51.

Purpose: This study aims to find out how SPBE implementation in Manokwari Regency supports the improvement of community services in the Manokwari Regency government. The other objective is to find out what the inhibiting factors are related to the implementation of this SPBE, and how or what are the government's efforts to overcome these inhibiting factors in the implementation of the SPBE which was carried out in Manokwari Regency, West Papua Province.

Methods: This study uses a qualitative approach with descriptive methods. The data used are primary data and secondary data collected through interviews and documentation.

Results/Findings: The results and findings are that the implementation of SPBE in Manokwari Regency has started to run but there are still several inhibiting factors in its implementation.

Conclusion: The implementation of the SPBE in Manokwari Regency has started to run well, but there are still several inhibiting factors in its implementation, namely, the many types of electronic services available but not integrated, the lack of human resources in the IT field, the limited facilities and infrastructure related to the implementation of the SPBE in the Regency Manokwari.

Keywords: Implementation, Public Services, Electronic Systems

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Manokwari dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik masih terdapat beberapa permasalahan yang menghambat jalannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Indeks penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Manokwari masih terbilang sangat kurang pada penilaian tahun 2021 masih dicapai pada angka 1.51. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi SPBE di Kabupaten Manokwari dalam mendukung peningkatan pelayanan masyarakat di pemerintahan Kabupaten Manokwari. Adapun tujuan lainnya yakni, mengetahui apa saja faktor-faktor yang menghambat terkait dengan implementasi SPBE ini, dan bagaimana ataupun apasaja upaya pemerintah dalam mengatasi faktor penghambat tersebut dalam implementasi SPBE yang dilaksanakan di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Adapun hasil dan temuan ini yakni implementasi SPBE di Kabupaten Manokwari sudah mulai di jalankan namun masih ada beberapa faktor penghambat pada pelaksanaannya. **Kesimpulan:** Implementasi SPBE di Kabupaten Manokwari sudah berjalan mulai di jalankan dengan baik namun masih ada beberapa faktor penghambat pada pelaksanaannya yaitu, banyaknya jenis pelayanan elektronik yang tersedia namun tidak terintegrasi, kurangnya SDM di bidang IT, Keterbatasan sarana dan prasarana terkait dengan pelaksanaan SPBE di Kabupaten Manokwari.

Kata Kunci: Implementasi, Pelayanan Publik, Sistem Elektronik

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

SPBE merupakan bentuk inovasi yang dilakukan dalam pemerintahan guna untuk melaksanakan kegiatan pelayanan yang lebih efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna SPBE. Seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE mempunyai tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Untuk meningkatkan keterpaduan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik dibutuhkan manajemen dan tata kelola SPBE didalamnya yang artinya bahwa Dalam SPBE tidak hanya sekedar pelaksanaan layanan sistem aplikasi ataupun sistem informasi pada penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, melainkan melebihi itu, SPBE juga memiliki berbagai macam domain dalam penerapannya yaitu, domain kegiatan pemerintahan, domain teknologi dan informasi, dan domain layanan. Pada domain kegiatan pemerintahan terdapat beberapa lingkup pada

penerapannya meliputi rencana ruang lingkup induk SPBE, proses bisnis, anggaran dan belanja SPBE, dan data informasi yang berbasis elektronik. Domain teknologi dan informasi juga memiliki beberapa lingkup seperti, pusat penyedia data yang terpadu, jaringan antar pemerintah, sistem yang menghubungkan layanan pemerintah, aplikasi layanan dan keamanan informasi data. Dan pada domain layanan meliputi, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik serta layanan publik berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seperti sekarang ini dimana TIK merupakan bagian dalam kehidupan masyarakat luas, hal ini juga tidak terlepas dari kegiatan pemerintahan yang memanfaatkan TIK dalam pelayanan guna mempermudah masyarakat dalam melakukan komunikasi dengan pemerintah, komunikasi antar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan memberikan manfaat bagi pemerintah dalam melakukan inovasi untuk membangun aparatur negara dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penerapan SPBE atau E-Government. SPBE memberikan peluang bagi pemerintah dalam mendorong dan merealisasikan pemerintahan yang transparan, partisipatif, inovatif serta akuntabel, peningkatan kerja sama antar instansi pemerintah dalam mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan, memberikan kualitas dan kuantitas dalam jangkauan layanan kepada pengguna masyarakat selaku SPBE, dan menurunkan angka kejahatan dalam pemerintahan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme melalui aplikasi sistem pengaduan masyarakat.

penerapan SPBE atau *E-government* sendiri merupakan upaya dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melakukan inovasi untuk membangun aparatur negara dan bertujuan juga untuk meningkatkan pelayanan publik. SPBE sendiri merupakan strategi yang memberi peluang bagi pemerintah dalam merealisasikan dan mendorong terjadinya suatu pemerintahan yang partisipatif, transparan, inovatif dan akuntabel, serta upaya peningkatan kerja sama antar instansi pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama, memberikan kualitas dan kuantitas terhadap jangkauan layanan kepada masyarakat selaku pengguna SPBE, dan juga dapat membantu pemerintah dalam upaya menurunkan angka kejahatan dalam suatu pemerintahan seperti tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme melalui aplikasi yang tersedia di dalam SPBE seperti aplikasi sistem pengaduan masyarakat.

1.2. Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Kabupaten Manokwari merupakan salah satu Kabupaten yang menjadi Ibu Kota Provinsi Papua Barat. Kabupaten Manokwari dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik masih terdapat beberapa permasalahan yang menghambat jalannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Indeks penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Manokwari masih berada pada predikat kurang pada penilaian tahun 2021. Penilaian Sistem Informasi Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Manokwari masih jauh dari target dan belum sesuai harapan, baik pada aspek domain kebijakan, domain tata kelola dan domain layanan SPBE. Saat ini indeks penilaian SPBE di Kabupaten Manokwari masih dicapai pada angka 1.51 Indeks penilaian SPBE ini merupakan hasil dari evaluasi SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) pelaksanaan SPBE di instansi pemerintah

dan bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah.

Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manokwari adalah SKPD yang melaksanakan tugas Pemerintah Daerah di bidang persandian, komunikasi dan informatika, berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun visi untuk terwujudnya masyarakat Kabupaten Manokwari Sebagai Pusat Peradaban di Tanah Papua dan Ibukota Provinsi Papua Barat yang Religius, Berdaya Saing, Maju, Mandiri Dan Sejahtera. Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada penerapan SPBE di Kabupaten Manokwari juga tentunya menjadi pekerjaan rumah untuk Pemerintah Daerah dan Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika.

Masih terdapat beberapa masalah yang menghambat penerapan SPBE terhadap pelayanan publik kurang relevan di Kabupaten Manokwari, hal ini merupakan pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna SPBE yaitu masyarakat serta memberi kepuasan di dalamnya dan untuk mencapai tujuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mewujudkan layanan publik yang berkualitas dan tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel yang berbasis elektronik.

1.3. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian dari Muhammad fadhil Ramli yang berjudul Implementasi Sistem Pemerintahan berbasis elektronik terhadap peningkatan pelayanan di Dinas Komunikasi dan Informasi kota palu Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan menunjukkan kualitas SPBE berada pada predikat kurang karena penilaian berada pada angka 1,21 ini menunjukkan pelaksanaan yang masih kurang.

Berdasarkan penelitian dari Wildan Zainul Faki yang berjudul Evaluasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Situbondo menggunakan Peraturan Menteri PANRB nomor 5 tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa nilai indeks SPBE yang diperoleh mendapatkan nilai 2,7925. Berdasarkan asesmen menunjukkan kualitas SPBE pada kategori baik.

Berdasarkan penelitian dari Aziz Bouti & Moh. Hidayat & Dian Novian yang berjudul Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menggunakan E- Government Maturity Model (Kasus di Pemerintah Gorontalo). Pada penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik dilingkungan Pemerintahan Kota Gorontalo dengan nilai indeks 2,88 dan memperoleh predikat baik

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) terhadap peningkatan pelayanan masyarakat pada dinas persandian, komunikasi dan informatika kabupaten Manokwari provinsi Papua Barat berbeda dan belum pernah ada yang

menggunakan dimensi yang ada pada konsep teori yang digunakan pada penelitian ini.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terhadap pelayanan di Dinas Persandian Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manokwari.

II. METODE

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan agar peneliti mendapatkan hasil yang maksimal dan memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara sistematis dengan melalui pendekatan. Menurut Sugiyono (2005) dalam Ismail Nurdin dan Sri Hartati (2019:75) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, dimana peneliti dimana peneliti ialah instrumen kunci.

III. HASIL/PEMBAHASAN

Penerapan menurut teori merupakan salah satu analisis dari sudut pandang para ahli atau pakar di bidang pemerintahan untuk mengetahui suatu permasalahan. Oleh karena itu konsep teori yang peneliti gunakan yaitu mengacu pada konsep implementasi SPBE pada Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terdapat tujuh dasardalam implementasi SPBE ini yakni efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, ekuntabilitas, interoperabilitas dan keamanan.

3.1 Berikut merupakan implementasi oleh Perpres nomor 95 tahun 2018

3.1.1 Efektivitas

Efektifitas merupakan optimalisasi yang memanfaatkan sumber daya pendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan. Artinya tepat guna, yang artinya yaitu dimana SPBE bisa memberi dampak yang nyata sesuai dengan atau fakta apa yang diharapkan.

Secara umum, efektivitas menekankan pada pencapaian dan tujuan akhir seperti peningkatan kualitas layanan, produktivitas kinerja maupun efisiensi. Efektifitas berpedoman pada pencapaian tujuan dan berfokus pada variabel akhir. Aspekaspek pendukung seperti tingkat kepuasan, standar moral, kemampuan komunikasi, dan sebagainya bisa dijadikan alat ukur keberhasilannya. Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informasi sudah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat akan tetapi masih ada beberapa masyarakat yang belum tersampaikan melalui sosialisasi akan penggunaan pelayanan elektronik.

3.1.2 Keterpaduan

Keterpaduan merupakan mengintegrasikan antara beberapa komponen menjadi satu yang bertujuan untuk mempermudah dalam menjalankan suatu kegiatan atau program dan dapat mudah dipahami. Keterpaduan merupakan mengintegrasikan sumber daya pendukung SPBE

yang berarti SPBE bersifat integratif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah begitu penting. SPBE berfungsi sebagai penghapus stigma terpisah-pisah yang selama ini identik dengan layanan yang ada pada pemerintah di Indonesia, sehingga seluruh instansi pemerintah dapat melakukan pelaporan melalui satu pintu dan bersifat vertikal. Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informasi sudah mulai mengintegrasikan SPBE yang ada di berbagai instansi pemerintahan di Kabupaten Manokwari dengan cara mengadakan pertemuan dengan semua Kepala Instansi terkait.

3.1.3 Kesenambungan

Kesenambungan merupakan keberlanjutan akan suatu objek ataupun subjek, dalam pemerintahan kesinambungan merupakan salah satu indikator penting dalam menjaga tatanan pemerintahan dengan baik yang bertujuan agar suatu kebijakan dapat bertahan dengan jangka waktu yang panjang.

Kesenambungan merupakan langkah-langkah lanjutan SPBE yang sudah terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya. Kesenambungan juga dapat diartikan agar semua lembaga pemerintahan dapat mengatasi masalah yang sering terjadi seperti pembuatan, pengelolaan, dan perawatan sistem yang mungkin terbengkalai dan memicu akan adanya kerugian besar pada pemerintah. Dengan SPBE yang sifatnya terpusat, masalah kolaborasi dan kesinambungan tentu dapat dimaksimalkan dengan baik.

Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Manokwari belum ada program khusus terkait dengan SPBE yang berkesinambungan, tetapi pemerintah akan membuat regulasi yang mengatur jalannya SPBE yang diharapkan akan menjaga keberlangsungan jalannya SPBE di Kabupaten Manokwari

3.1.4 Efisiensi

Efisien dapat diartikan sebagai cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) serta sesuai keinginan, dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan. Bekerja secara efisien adalah bekerja menggunakan sumber daya yang sesuai.

Efisien artinya berhasil guna. Hal ini berkaitan dengan penyederhanaan berbagai sistem yang ada. Jika sistem sebelumnya masih berbelit-belit, dengan memanfaatkan SPBE, berbagai macam kepentingan pelaporan ataupun kegiatan lainnya dari tingkat pusat maupun daerah dapat dilaksanakan dengan cepat tanpa adanya hambatan. Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan SPBE merupakan salah satu tolak ukur dalam keberhasilannya.

Pemerintah Kabupaten Manokwari sudah menerapkan berbagai bentuk pelayanan elektronik yang tersedia di masing-masing OPD. Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika yang bertugas di bidang itu mengupayakan untuk melakukan perbaikan baik dari segi sarana prasarana dan SDM.

3.1.5 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab

dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Dalam hal ini Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika telah berupaya untuk mengkoordinasikan pelayanan elektronik terpusat pada Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika, selain untuk mempermudah pelayanan juga untuk mengetahui segala macam pelaporan yang ada dan melaporkan langsung pada Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika agar lebih transparan pelaporan yang ada.

3.1.6 Interoperabilitas

Interoperabilitas merupakan koordinasi dan kolaborasi pemerintah antar sistem pelayanan elektronik, dalam rangka pertukaran informasi, data, atau layanan SPBE. Interoperabilitas juga dapat diartikan dimana keadaan sistem teknologi yang ada mampu bertukar dan menggunakan informasi yang ada antara satu dengan lainnya dan tidak terbatas ruang dan waktu. Prinsip ini tidak bisa dilupakan sama sekali di zaman kemajuan TIK seperti sekarang ini. Dengan interoperabilitas, SPBE dapat digunakan di berbagai platform secara real-time dan minim kendala.

Pemerintah Kabupaten Manokwari belum melaksanakan pengkoordinasian pelayanan elektronik antar OPD, Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika melakukan upaya untuk mengkoordinasikan segala bentuk pelayanan elektronik di Kabupaten Manokwari.

3.1.7 Keamanan

Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan dengan hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain. Keamanan merupakan topik yang luas termasuk keamanan nasional terhadap serangan teroris, keamanan komputer terhadap peretas, keamanan rumah terhadap maling dan penyusup lainnya, keamanan finansial terhadap kehancuran ekonomi dan banyak situasi yang berhubungan dengan keamanan yang lainnya.

Keamanan merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, dan keaslian karena SPBE menggunakan platform digital, jelas prinsip keamanan harus menjadi faktor utama pada pelaksanaannya. Bukan hanya menghindari serangan siber yang bisa saja terjadi, sistem yang ada pun dapat mendeteksi manipulasi, kejanggalan, dan kecurangan yang bisa saja terjadi sehingga menghasilkan hasil audit evaluasi di akhir yang akurat. Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika mempunyai cara tersendiri dalam penanganan masalah data dengan upaya memantau data yang ada agar tidak terjadi hal tidak di inginkan seperti pencurian data masyarakat sebagai pengguna SPBE.

3.2 Faktor-Faktor Penghambat Implementasi SPBE di Kabupaten Manokwari

A. SDM yang kurang Berkompeten di bidang IT

Salah satu faktor penghambat yang sangat berpengaruh dalam Implementasi SPBE yaitu Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam pengelolaan IT. Hal ini membuat perkembangan SPBE menjadi lambat karena kurangnya tenaga pekerja yang bergerak di bidang pengelolaan Teknologi.

B. Pelayanan Elektronik belum terintegrasi

Banyaknya pelayanan elektronik yang ada pada setiap OPD menjadi sebuah tantangan bagi Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika untuk mengkoordinasikan layanan-layanan tersebut menjadi terpusat

C. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Keterbatasan Sarana dan prasarana merupakan suatu masalah atau merupakan suatu faktor yang menghambat jalannya Penyelenggaraan SPBE. Hal ini dapat di katakan karenan kurangnya dukungan dari sarana dan prasaranan mengakibatkan perkembangan penyelenggaraan SPBE menjadi lambat. sarana dan prasarana di maksud adalah Kantor DPKominfo yang bisa di bilang sangat kecil sehinggann menyebabkan terjadinya keterbatasan uang bkerja bagi pegawai dan juga permasalahan jaringan internet yang sering terjadi gangguan dan belum terlalu bagus serta keterbatasan server untuk mendukung di bidang TIK.

3.3 Upaya yang dilakukan Untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi SPBE di Pemerintahan Kabupaten Manokwari

A. Mengoptimalkan SDM yang ada

Sumber daya Manusia merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan SPBE, kurangnya SDM yang berkompeten dalam pengelolaan TIK pada Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu faktor penghambat berjalannya SPBE di kabupaten Manokwari . Demi tercapainya Implementasi SPBE yang baik , Dpkominfo selaku dinas yang bertanggung jawab dalam Implementasi SPBE sudah melakukan upaya untuk meningkatkan SDM yang ada.

B. Mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan elektronik

Guna meningkatkan pelayanan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Manokwari Dinas Persandian, komunikasi dan Informatika sudah melakukan tindakan untuk mengintegrasikan berbagai layanan agar terpusat di Dinas Kominfo, Upaya ini terus di lakukan agar dapat meningkatkan pelayanan yang ada dan Implementasi SPBE pada Kabupaten Manokwari dapat meningkat

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 Tentang pedoman evaluasi penulis menemukan penemuan penting yaitu Nilai indeks SPBE yang diperoleh di Kabupaten

Situbondo mendapatkan nilai 2,7925. Berdasarkan asesmen menunjukkan kualitas SPBE pada kategori baik. Hal ini memberikan dampak positif terhadap pemerintahan yang ada pada kabupaten Situbondo dalam semua aspek pemerintahan baik itu dari segi pelayanan publik maupun administrasi (Wildan Zainul Faki).

Bahwa pada pemerintahan Kabupaten Manokwari dalam pelaksanaan *E-Government* belum serius dalam mendukung perkembangannya, seperti pengembangan sumber daya manusia, sarana prasarana dan infrastruktur dan anggaran dalam mendukung pelayanan setiap SKPD di Kabupaten Manokwari. Hal ini menjadi acuan dan masukan untuk pemerintah kedepannya dimana yang seperti kita ketahui *E-Government* merupakan hal penting dalam pelaksanaan pemerintahan yang ada pada suatu daerah agar kedepannya pemerintah Kabupaten Manokwari dapat memperbaiki menjadi lebih baik.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa banyaknya pelayanan elektronik yang ada pada pemerintahan Kabupaten Manokwari akan tetapi tidak terorganisir pada Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika sehingga ini menjadi faktor penghambat dikarenakan masing-masing instansi pemerintah menggunakan cara sendiri dalam penggunaan sehingga berpengaruh terhadap pelaporan.

IV. KESEIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi SPBE di Kabupaten Manokwari yang di laksanakan oleh Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika belum berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari tercapainya secara keseluruhan target maupun sasaran yang di harapkan, ditinjau dari prinsip Implementasi SPBE yaitu Efektifitas, Keterpaduan, Kesenambungan, Efisiensi, Akuntabilitas, Interoperabilitas, Keamanan masih bisa di lihat bahwa ada beberapa hambatan yang menyebabkan Implementasi SPBE belum berjalan dengan efektif.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang tergolong singkat yaitu hanya selama 2 minggu, karena waktu yang singkat ini mengakibatkan penelitian yang dilakukan menjadi kurang maksimal. Waktu penelitian yang diberikan juga disesuaikan dengan Kalender Akademik IPDN Tahun 2022/2023

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap Peningkatan pelayanan masyarakat pada Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat untuk menemukan hasil yang lebih dalam lagi.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan terutama kepada Kepala Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manokwari beserta jajarannya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian

serta penulisan ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. 2007. Penelitian pendidikan prosedur dan strategi. Jakarta :Balai Pustaka.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mutiarin, Dyah. dan Zaenudin, A. 2014. Manajemen Birokrasi dan Kebijakan.Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nurdin, Ismail, dan Sri Hartati (2019) Metodologi Penelitian Sosial.Surabaya: Media Sahabat Cendekia
- Silalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Refika Aditama Simangunsong.
2017. Metodologi Penelitan Pemerintahan TeotitikLegalistik- Empirik- Inovatif. Bandung: Alfabeta, Cv
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

